

**KETIDAKMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH
DAN DAMPAKNYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Yesie Cindra M – 14010112130135
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan ,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan. Prof.H.Soedharto,SH, Tembalang, Semarang. Kontak Pos 1269
Telepon: (024) 7465407 Fax: (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Otonomi Daerah merupakan kewenangan yang di berikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan juga hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah, tidak semua daerah dapat berkembang pesat, sehingga ada beberapa daerah yang digolongkan masih tertinggal. Salah satunya adalah Kabupaten Banjarnegara. Untuk melepaskan status sebagai daerah tertinggal, Kabupaten malakukan berbagai perbagai pembangunan sarana dan prasarana. Sehingga pada tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara berhasil terlepas dari status daerah tertinggal.

Setelah terlepas dari status daerah tertinggal, sampai saat ini Kabupaten Banjarnegara msih terus melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Pembangunan yang ideal haruslah bersifat adil dan merata. Namun dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara ini belum merata.

Untuk itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai ketidakmerataan pembangunan infrastuktur daerah, khususnya infrastruktur jalan/jembatan, jaringan irigasi dan pasar. Serta dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur daerah dikarenakan pembangunan yang ada hanya terfokus pada daerah perkotaannya. Sehingga terjadi ketimpangan di bidang ekonomi yang cukup signifikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Kata Kunci: Pembangunan Infrastruktur, Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten

ABSTRACT

Regional autonomy is an authority that is given to autonomous regions to regulate and manage government affairs and the interests of the local community according to the aspirations of the community to increase the usability and also the results for the administration of government in the context of service to the community and implementation of legislation.

But in the implementation of regional autonomy, not all regions can develop rapidly, so that there are several regions classified as still lagging behind. One of them is Banjarnegara Regency. To relinquish its status as a disadvantaged area, the Regency has carried out various development activities and infrastructures. So that in 2010 Banjarnegara District succeeded regardless of the status of underdeveloped regions.

After being detached from the status of underdeveloped regions, until now Banjarnegara Regency is still continuing to carry out various development activities to strengthen the economy of the community. Ideal development must be fair and equitable. But in practice, infrastructure development in Banjarnegara Regency has not been evenly distributed.

For this reason, this study will discuss the inequality of regional infrastructure development, especially road / bridge infrastructure, irrigation networks and markets. And its impact on people's welfare.

The results of this study, the inequality of regional infrastructure development is because the existing development is only focused on the urban

area. So that economic inequality is quite significant between urban areas and rural areas.

Keywords: Infrastructure Development, Community Welfare, District Government

PENDAHULUAN

Dalam negara yang menganut demokrasi tentu sudah tidak asing dengan otonomi daerah. Otonomi daerah ini biasanya diterapkan di negara serikat dan kesatuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Indonesia memasuki era otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah mengacu pada UU nomor 32 tahun 2004 mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (power sharing) antara pemerintah pusat dan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut. Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak semua daerah dapat berkembang, dan tingkat perkembangan suatu daerahnya pun berbeda-beda. Berdasarkan Badan Pusat Statistik(2014), jumlah kabupaten di Indonesia ada 416. Namun, tidak semua daerah kabupaten bisa tumbuh dan berkembang dengan pesat, ada beberapa daerah yang masih tertinggal. Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (2004) penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada perhitungan enam kriteria dasar yaitu (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia, (3) sarana dan prasarana (*infrastruktur*), (4) kemampuan keuangan daerah (*celah fiskal*), (5) aksesibilitas dan (6) karakteristik daerah

Berdasarkan data di Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (2003-2007), jumlah kabupaten tertinggal di Indonesia mencapai 199 kabupaten. Tiga kabupaten berada di Propinsi Jawa Tengah, masing-masing Kabupaten Banjarnegara, Wonogiri dan Rembang. Sedangkan jumlah desa tertinggal di Indonesia, berdasar data potensi desa dari BPS, mencapai 32.379 desa. Khusus di Propinsi Jawa Tengah, dari 8.864 desa, 3.467 desa di antaranya tertinggal.

Untuk melepaskan status sebagai daerah tertinggal, Kabupaten melakukan berbagai pembangunan baik pembangunan fisik maupun non fisik di berbagai aspek. Dengan dilakukannya sejumlah pembangunan di Banjarnegara, Kabupaten berhasil melepaskan status sebagai daerah tertinggal pada awal tahun 2010. Pada tanggal 23 Mei 2010 Banjarnegara menerima piagam sebagai daerah maju. Hingga sampai saat ini pembangunan infrastrukture daerah di Kabupaten Banjarnegara masih terus dilakukan.

Berdasarkan UU no 25 tahun 2004, pembangunan seharusnya bersifat adil dan merata, namun di daerah ini pembangunan yang ada masih bersifat terpusat. Pembangunan infrastruktur daerah yang tidak merata, terutama di bidang pertanian dan pengairan, jalan dan pasar tentunya akan berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab ketidak pemerataan pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, jaringan irigasi dan pasar dan mengetahui dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penjabaran deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar pembangunan daerah di wilayah Banjarnegara dapat menyeluruh dan adil. Penelitian Kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang

sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Data diambil melalui proses wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan observasi di Baperlitbang, BPS, dan DPU Kabupaten Banjarnegara.

HASIL PENELITIAN

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah “ **Banjarnegara yang Bermartabat dan Sejahtera**”. Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

1. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten bermartabat.

Dengan pokok misi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat dari daerah lain baik di level regional maupun nasional. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

2. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin pada reformasi birokrasi harus terus dilakukan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka bupati merumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis.
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintah berdasarkan konsep tata kelola yang baik
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan.

4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Strategi pembangunan infrastruktur Kabupaten Banjarnegara terdapat dalam perumusan turunan dari pokok misi pembangunan RPJMD Kabupaten Banjarnegara ke 3 (tiga) yang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. Adapun misi tersebut terdapat pada poin misi ke 4, yaitu:

- a. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- b. Meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

PEMBAHASAN

Panjang jalan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 secara total dari jalan kabupaten 938,693 km dan jalan provinsi 88,029 km. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu panjang jalan kabupaten 922,861 km.

Dilihat dari jenis permukaan, panjang jalan di Kabupaten Banjarnegara dapat dibagi menjadi tiga yaitu, jalan aspal, jalan kerikil/batu, dan jalan tanah. Khusus untuk jalan provinsi hanya terdiri dari jenis jalan yang diaspal. Pada tahun 2017 jalan kabupaten jenis jalan aspal 827,182 km, jalan kerikil 94,310 km dan jalan tanah 17,201 km.

Apabila jalan kabupaten dilihat dari kondisi jalan tahun 2017, terdapat 166,212 km dalam kondisi baik, 501,628 km dalam kondisi sedang, 155,807 km rusak ringan, dan 115,046 dalam kondisi rusak berat.

Sedangkan untuk jaringan irigasi di Kabupaten Banjarnegara digolongkan menjadi tiga jenis yaitu, jenis saluran irigasi primer, sekunder dan tersier. Pada tahun 2017 panjang jaringan irigasi primer 140.589 m, irigasi sekunder 403.787 m dan irigasi tersier 481.222 m.

Untuk jumlah pasar besar yang ada di Kabupaten Banjarnegara digolongkan menjadi empat jenis, yaitu pasar umum, pasar hewan, pasar buah dan pasar ikan. Pasar besar ini adalah pasar yang digunakan sebagai pengumpul atau distribusi hasil-hasil bumi dari berbagai kecamatan yang ada di Kecamatan Banjarnegara. Pada tahun 2017, jumlah pasar umum 20, pasar hewan 2, pasar buah 1, dan pasar ikan 0.

Pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, irigasi, dan pasar di Kabupaten Banjarnegara masih belum merata. Pembangunan infrastruktur tersebut masih terpusat di kecamatan Banjarnegara atau pusat perkotaannya, sedangkan di kecamatan-kecamatan yang lain pembangunannya masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah pembangunan infrastruktur jalan/jembatan, irigasi dan pasar selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Banjarnegara berikut ini:

No	Nama Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2016		
		Jalan	Irigasi	Pasar	Jalan	Irigasi	Pasar	Jalan	Irigasi	Pasar
1	Banjarmangu	11	7	0	6	2	0	8	2	0
2	Banjarnegara	28	38	1	22	8	0	19	12	0
3	Batur	4	2	0	7	1	0	4	1	0
4	Bawang	7	4	0	5	0	1	6	1	0
5	Kalibening	8	1	0	10	5	0	1	1	0
6	Karangkobor	13	0	1	3	2	1	4	0	0
7	Madukara	4	1	0	7	2	0	5	4	1
8	Mandiraja	6	3	0	8	2	0	5	1	2
9	Pagentan	4	3	0	4	2	0	4	1	1
10	Pagedongan	6	2	0	5	1	0	3	0	0
11	Pandanarum	4	0	0	6	9	0	4	2	0
12	Pejawaran	5	8	0	8	6	0	6	4	0
13	Punggelan	10	8	0	18	5	1	13	4	0
14	Purwanegara	10	0	1	3	0	0	3	0	1
15	Purworejo-klampok	4	0	0	5	0	0	5	1	0
16	Rakit	5	3	1	6	0	0	3	0	0
17	Sigaluh	5	2	0	6	5	0	3	3	0
18	Susukan	6	8	0	9	3	0	3	2	0
19	Wanadadi	7	2	0	5	3	0	5	1	0
20	Wanayasa	9	3	0	6	6	0	8	0	1
Jumlah		156	95	4	149	62	3	112	40	6

Dalam setiap pembangunan infrastruktur, tidak semua pembangunan dapat merata di setiap daerahnya. Ketidakmerataan pembangunan ini diakibatkan oleh berbagai faktor. Untuk Kabupaten Banjarnegara, penyebab ketidakmerataan pembangunan infrastruktur daerah adalah kontur geografi dan topografi Kabupaten Banjarnegara, kepadatan penduduk, serta tingkat kevitatan dari masing-masing daerah.

1. Kontur Geografi dan Topografi

Kabupaten Banjarnegara secara geografis terletak di antara $7^{\circ}12'$ - $7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}45'50''$ Bujur Timur. Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah 106.970,997 Ha atau 3,29% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Timur : Kab. Wonosobo
- Sebelah Selatan : Kab. Kebumen
- Sebelah Barat : Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Posisi Kabupaten Banjarnegara yang dibatasi oleh pegunungan di sebelah Selatan dan Utara membuat Kabupaten Banjarnegara menjadi daerah yang semi terisolasi. Daerah perbukitan dan pegunungan di Kabupaten Banjarnegara juga merupakan daerah yang rawan bencana, sehingga menjadi tempat yang jarang ditinggali oleh penduduk.

Daerah Utara Banjarnegara merupakan daerah dengan ketinggian lebih dari 1.000 m dari permukaan air laut. Daerah ini menjadi daerah pertanian dan perkebunan. Mayoritas penduduk di daerah ini pun bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah Utara ini lebih terfokus pada pembangunan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.

Sedangkan untuk daerah selatan Kabupaten Banjarnegara, merupakan daerah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan air laut. Daerah ini

merupakan daerah perkotaan dengan pusat perindustrian dan perdagangan. Potensi di wilayah inipun berbagai macam, mulai dari perkebunan salak, budi daya ikan, kerajinan keramik dan lain-lain. Sehingga pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan lebih banyak untuk mendukung sarana dan prasarana perekonomian. Di daerah Selatan Kabupaten Banjarnegara pun, banyak terdapat waduk dan bendungan, sehingga jaringan irigasi di daerah selatan ini lebih banyak. Selain itu, daerah perkotaan ini merupakan daerah yang di lintasi oleh jalan provinsi. Sehingga pembangunan infrastruktur jalan/jembatan yang ada lebih diutamakan.

Daerah ibukota Kabupaten berada di daerah pusat atau perkotaan, sehingga banyak gedung-gedung perkantoran maupun fasilitas publik lainnya yang di dirikan di daerah perkotaan untuk mendukung lancarnya proses pemerintahan dan administrasi.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam pembangunan penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara pada akhir tahun 2017 sebanyak 912.917 jiwa, dengan kepadatan penduduk 853 jiwa per km², yang berarti bahwa setiap 1 km² luas Kabupaten Banjarnegara, dihuni oleh sekitar 853 orang.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk/km
1	Banjarmangu	46,36	42.993	927
2	Banjarnegara	26,24	68.110	2.596
3	Batur	47,17	38.814	823
4	Bawang	55,25	55.687	1.008
5	Kalibening	83,78	42.017	502
6	Karangobar	39,07	30.073	770
7	Madukara	48,20	43.413	901
8	Mandiraja	52,61	65.251	1.240
9	Pagentan	46,19	36.118	782
10	Pagedongan	80,51	35.184	437
11	Pandanarum	58,56	20.301	347
12	Pejawaran	52,25	41.852	801
13	Punggelan	102,84	74.627	726
14	Purwanegara	73,86	68.307	925
15	Purwareja-Klampok	21,87	41.608	1.903

16	Rakit	32,45	47.466	1.463
17	Sigaluh	39,56	30.813	779
18	Susukan	52,66	54.055	1.026
19	Wanadadi	28,27	29.264	1.035
20	Wanayasa	82,01	46.964	573
Jumlah		1.069,71	912.917	853

Kecamatan Banjarnegara merupakan daerah dengan kepadatan penduduk terbanyak di Kabupaten Banjarnegara. Dilihat dari luas wilayahnya, Kecamatan Bajarnegara merupakan daerah dengan luas wilayah terkecil kedua dari total dua puluh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, dengan luas 26,24 km² atau 2,45% dari keseluruhan luas Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan ini berjumlah 68.110 jiwa. Berarti dalam setiap kilometer, Kecamatan Banjarnegara dihuni oleh 2.596 penduduk.

Dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat padat, maka keteersediaan sarana dan prasarana di daerah ini harus lebih banyak agar kebutuhan seluruh masyarakat dapat dapat terpenuhi.

Berbeda dengan Kecamatan Banjarnegara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, kecamatan-kecamatan di daerah utara Banjarnegara, seperti Kecamatan Batur, Kalibening, Karangkoar, Pagentan, Pandanarum dan Punggelan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah, yaitu dihuni oleh 350-825 penduduk dalam setiap kilometer. Sehingga kebutuhan sarana dan prasarana di kecamatan ini tidak sebanyak di kecamatan Banjarnegara.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidakmerataan infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara diakibatkan oleh faktor kontur geografi dan topografi, kepadatan penduduk, dan kevitatan suatu daerah atau tingkat potensi masing-masing daerah. Kontur daerah Kabupaten Banjarnegara yang berupa perbukitan dan pegunungan membuat persebaran penduduk di masing-masing daerah tidak sama. Potensi yang dimiliki dari masing-masing daerah juga

berbeda menurut letak dan kondisi ketinggiannya. Di daerah pedesaan atau daerah utara Kabupaten Banjarnegara potensi daerahnya adalah pertanian. Sedangkan di daerah perkotaan atau selatan Kabupaten Banjarnegara, potensi daerahnya lebih beragam. Sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur

Daerah perkotaan yang merupakan daerah industri, perdagangan, dan budidaya ikan membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di bandingkan dengan daerah pedesaan. Selain itu tingkat kepadatan penduduk di daerah perkotaan juga lebih padat. Daerah perkotaan yang merupakan daerah padat penduduk dan membutuhkan sarana, prasarana serta fasilitas publik yang banyak tentunya menjadi daerah yang sangat vital. Sehingga infrastruktur daerah yang ada perlu dilakukan pembangunan secara terus-menerus dan perbaikan serta perawatan yang baik. Dengan pertimbangan ketiga aspek tersebut, pemerintah kabupaten lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan dan pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan di daerah perkotaan. Sedangkan pembangunan di daerah pedesaan kerap kali ditunda, karena anggaran dialokasikan untuk pembangunan di daerah perkotaan terlebih dahulu.

Pembangunan infrastruktur yang terpusat di daerah perkotaan dan diarahkan pada daerah yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan ini menyebabkan ketimpangan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Tingkat perekonomian antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan sangat berbeda. Di daerah perkotaan, sebagian besar tingkat pendapatan masyarakatnya sudah diatas upah minimum regional. Sedangkan untuk masyarakat di daerah pedesaan tingkat pendapatannya masih di bawah upah minimum regional. Hal ini dikarenakan, mayoritas penduduknya yang bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sulitnya akses transportasi di daerah pedesaan, membuat pendistribusian hasil pertanian dan perkebunan mereka menjadi terhambat dan membutuhkan biaya lebih. Selain itu, resiko gagal panen yang dialami oleh petani terkadang juga menyebabkan pendapatan mereka menjadi berkurang.

Dengan tingkat pendapatan yang masih minim ini, tentunya berdampak pula pada aspek sosial, pendidikan dan kesehatan. Di daerah pedesaan banyak anak-anak yang putus sekolah dan memutuskan untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Tingkat kesehatan di daerah pedesaan pun cukup memprihatinkan karena kondisi rumah dan lingkungan yang tidak layak huni mengakibatkan kesehatan masyarakatpun terganggu. Berbeda dengan tingkat pendapatan di perkotaan yang mayoritas sudah di atas upah minimum regional, tingkat pendidikan di daerah perkotaan sudah baik. Sebagian besar sudah menjalankan program minimal sembilan tahun dan bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Serta tingkat kesehatan di perkotaan sudah dalam kondisi yang baik, dalam artian masyarakat sudah peduli akan pentingnya kesehatan.

SARAN

Pembangunan infrastruktur daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Pembangunan infrastruktur yang diarahkan pada daerah yang memiliki potensi lebih besar dan daerah yang lebih penting juga umum dilakukan di setiap daerah. Namun, dengan sarana, prasarana serta fasilitas publik yang lebih banyak dibutuhkan di daerah perkotaan bukan berarti pembangunan sarana prasarana di daerah pedesaan bukan hal yang tidak penting atau dapat dabaikan. Pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan juga sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan. Karena dengan mudahnya aksesibilitas di daerah pedesaan akan mendorong pertumbuhan perekonomian dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang lainnya.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang adil dan merata, pemerintah kabupaten Banjarnegara sebaiknya juga memperhatikan daerah-daerah pedesaan bukan hanya daerah-daerah yang di anggap vital atau perkotaan. Ketersediaanya infrastruktur jalan/jembatan, jaringan irigasi serta pasar di daerah-daerah pedesaan yang memadai akan menjadi penunjang dalam perkembangan perekonomian di suatu daerah. Dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai di daerah perkotaan dan kemudahan akses transportasi dan jalan di daerah pedesaan, maka di pertumbuhan perekonomian di masing-masing daerah dapat tercapai. Sehingga

tidak terjadi ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Kemudian, pemerintah kabupaten sebaiknya melakukan pemeliharaan infrastruktur secara berkala pada daerah-daerah di pedesaan yang memiliki resiko kerusakan paling besar. Sehingga kerusakan yang ada tidak semakin parah dan dapat meminimalisir dampak negatif pada masyarakat, baik dari segi perekonomian, sosial, pendidikan maupun kesehatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten sebaiknya memperbanyak lagi pembangunan infrastruktur jalan/jembatan baik berupa peningkatan kondisi jalan maupun pemeliharaan secara rutin. Memperbanyak jumlah jaringan irigasi, serta revitalisasi pasar dan membangun pasar-pasar yang baru, agar pendistribusian hasil bumi para petani tidak hanya di perkotaan dan kabupaten yang lain tetapi juga menyeluruh di kecamatan yang ada di Banjarnegara.

Dengan ketiga hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, bukan hanya di daerah perkotaan saja tetapi juga di daerah pedesaan, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat sehingga terlepas dari kemiskinan. Serta masyarakat dapat hidup dengan layak dan membawa dampak yang baik di berbagai aspek kehidupan baik sosial, pendidikan maupun kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

B.N Marbun. 2005. *DPRD dan otonomi daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Hlm 8.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. 2018. *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka Banjarnegara Regency in Figures 2018*. Banjarnegara

Badan Pusat Statistik. 2010. *Penyempurnaan Penyusunan Indeks Pembangunan Nasional*. Jakarta: Nario Sari. Hlm 30

Bappenas. 2004. *Program Pengembangan Wilayah Tertinggal Jangka Menengah 2005-2009*. Jakarta

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaindo dan Offset
- Fakih, Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- Hidayat, W dan Hesel Nogi S dan Nyimas Dwi Koryati. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. 2004. *Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal*. Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Jakarta.
- Mahbubah, A. 1995. *Sistem Perwilayahan dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten DT II Garut, Propinsi Jawa Barat)*. Skripsi. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004*. Citra Umbara. Bandung.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. 2017. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022*. Banjarnegara
- Prasetyo, R.B. 2008. *Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi*. Bogor : Skripsi Sarjana Ekonomi, Institut Pertanian Bogor.
- Siagian, Sondang. P.2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Sutopo, HB. *Metode Penelitian Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS, 1990.
- Yanuar, R. 2006. *Kaitan Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Output serta Dampaknya terhadap Kesenjangan di Indonesia*. Bogor : Tesis pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah :Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti

INTERNET:

http://ahid-wahyu-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-108350-Umum-OTONOMI%20DAERAH.html

<http://www.artikelsiana.com/2017/07/pengertian-infrastruktur-definisi-infrastruktur.html>

<http://daniumar20.blogspot.com/2012/05/makna-pembangunan-nasional.html>

<http://denganbismillahakubisa.blogspot.com/2015/04/perencanaan-pembangunan-daerah-1.html>

<http://lpse.banjarnegarakab.go.id/eproc/lelang.search>

<http://rachmatdwimulya.blogspot.com/2014/09/konsep-pemerataan-pembangunan-daerah.html>

<http://www.radarplanologi.com/2015/10/apa-itu-infrastruktur.html>

<http://sapa.kemendagri.go.id/faq/detil/24>

<http://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan.html>